

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Mohamad Kemal Abror  
NPP. 31.0553

Asdaf Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur  
Prodi Studi Kebijakan Publik  
Email: [mohamadkemal90@gmail.com](mailto:mohamadkemal90@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Hardiyanto Rahman, S.IP, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Program Keluarga Harapan (PKH) in the field of education is one of the Ministry of Social Affairs' initiatives to address household-based poverty. However, the educational assistance component of PKH in Situbondo Regency has not yet been fully and effectively implemented due to several obstacles. **Purpose:** This study aims to understand the implementation of PKH in the field of education in Situbondo Regency, East Java Province, identify the factors hindering its implementation, and explore the efforts made to overcome these obstacles. **Method:** The study employs a descriptive approach using qualitative methods. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The study uses Muchlis Hamdi's implementation theory, which comprises dimensions and determinants of policy implementation. **Result:** The research findings indicate that, in general, the implementation of PKH in the field of education in Situbondo Regency, viewed from the dimensions of policy implementation, has become increasingly productive, linear, and efficient. Minor issues occur in the efficiency dimension concerning technology due to changes in the policy support application, from e-PKH to SIKS-NG. Analyzing the determinants of policy implementation, several inhibiting factors are identified: the substance of the policy determinant includes delays in disbursing PKH funds; the interaction network determinant involves slow responses and suggestions from the relevant agencies; and the resource determinant covers limited information availability and insufficient facilities and infrastructure for PKH assistants. **Conclusion:** Efforts made to address these issues include increasing transparency in determining PKH beneficiaries, improving facilities and infrastructure for PKH assistants, notifying about delays in fund disbursement, and enhancing the supporting applications for PKH education information.

**Keywords:** Implementation, Program Keluarga Harapan (PKH), Education, Poverty

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan salah satu program Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan berbasis rumah tangga. Namun, bantuan PKH yang fokusnya berupa bantuan pendidikan di Kabupaten Situbondo masih belum terlaksana dengan baik dan optimal, karena masih ditemukan beberapa hambatan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PKH bidang pendidikan di Kabupaten

Situbondo Provinsi Jawa Timur dan mengetahui faktor penghambat implementasinya serta upaya dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Muchlis Hamdi yang terdiri dari dimensi dan determinan implementasi kebijakan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi PKH bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo dilihat dari aspek dimensi implementasi kebijakan sudah berjalan semakin produktif, linear, dan efisien. Sedikit kendala terjadi pada dimensi efisiensi segi teknologi karena perubahan aplikasi pendukung kebijakan, yaitu dari e-PKH menjadi SIKS-NG. Dianalisis dari aspek determinan implementasi kebijakan ditemukan beberapa faktor penghambat kebijakan, yaitu pada determinan substansi kebijakan berupa adanya keterlambatan pencairan dana bantuan PKH, determinan interaksi jejaring kerja berupa lambatnya respon serta saran dari dinas terkait kebijakan tersebut, serta determinan sumber daya berupa ketersediaan informasi yang terbatas, kurangnya sarana dan prasarana pendamping PKH. **Kesimpulan:** Adapun upaya yang dilakukan, adalah peningkatan transparansi dalam penentuan penerima manfaat PKH, peningkatan sarana dan prasarana bagi pendamping PKH, pemberitahuan keterlambatan pencairan dana bantuan, serta peningkatan aplikasi pendukung informasi PKH bidang pendidikan.

**Kata kunci:** Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Pendidikan, Kemiskinan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan salah satu permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, terus menjadi permasalahan global yang utama dan kini sedang ditangani oleh pemerintah Indonesia. Kabupaten Situbondo termasuk kabupaten/kota dengan proporsi dan jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Timur, tepatnya urutan ke-10 dari 38 kabupaten/kota dengan Kabupaten Sampang yang tertinggi (BPS Jawa Timur, 2020). Kabupaten Situbondo berpenduduk 694.081 jiwa pada tahun 2022. Jumlah penduduk Kabupaten Situbondo bertambah 8.114 jiwa atau 1,18% dari 685.967 jiwa pada tahun 2021 ke tahun 2022 (BPS Kabupaten Situbondo, 2023).

Pada tahun 2022 persentase kemiskinan di Kabupaten Situbondo sebesar 11,78%. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, yaitu 12,63%. Dengan persentase sebesar 11,78% tersebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo sebanyak 81.460 jiwa. Hal ini berarti terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 5.490 jiwa daripada tahun 2021 (BPS Kabupaten Situbondo, 2023). Penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2022 karena dampak dari pandemi Covid-19 yang sudah mulai berkurang serta upaya dan strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan termasuk salah satu masalah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam mengatasinya karena memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Membuat peraturan untuk mengendalikan pengentasan kemiskinan adalah salah satu strategi pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dikonsultasikan

dalam penyusunan Program Pengentasan Kemiskinan. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan menjadi landasannya. Dijelaskan pada Pasal 21 mengenai program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang meliputi: (a) bantuan pangan; (b) bantuan perumahan; (c) bantuan pelayanan kesehatan; dan (d) bantuan pendidikan.

Program Keluarga Harapan (PKH), salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam memerangi kemiskinan berbasis rumah tangga, dan merupakan salah satu dari beberapa program prioritas yang kini dijalankan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengentaskan kemiskinan. Landasan Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, selanjutnya Program Keluarga Harapan diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program bantuan sosial bersyarat yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH) ditawarkan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang terdaftar dengan syarat dan batasan tertentu. Program bantuan ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sejak tahun 2007 (Permensos RI No. 1 Tahun 2018, 2018). Berikut tujuan utama pelaksanaan PKH:

- a) Mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan;
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
- c) Mengubah perilaku yang kurang mendukung dalam peningkatan kesejahteraan dari kelompok sangat miskin.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Fokus utama bantuan PKH adalah menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi daerah miskin dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal ini berupaya meningkatkan taraf pendidikan sekaligus memperluas pembangunan sektor fisik (gedung dan infrastruktur). Indeks pendidikan dapat menunjukkan seberapa besar peningkatan kualitas sumber daya manusia di Situbondo sebagai hasil dari inisiatif pendidikan. Gambaran sistem pendidikan dapat dilihat dengan memanfaatkan sejumlah indikator yang bersumber dari temuan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS Kabupaten Situbondo, khususnya di bidang pendidikan.

Indeks Pendidikan Kabupaten Situbondo sebesar 0,57 pada tahun 2018 dan 2019. Setelah itu, meningkat menjadi 0,58 pada tahun 2020, kemudian masing-masing menjadi 0,59 dan 0,60 pada tahun 2021 dan 2022. Jika Indeks Pendidikan mencapai 0,95–1, maka dianggap tinggi. Kategori rendah berada dibawah 0,80, dan kategori sedang berada diatas 0,80. Perkembangan sektor pendidikan masih berada pada level rendah, terlihat dari kategori Indeks Pendidikan. Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan salah satu matriks yang digunakan untuk menghitung Indeks Pendidikan, adalah jumlah tahun penduduk mengenyam pendidikan formal. Diharapkan rata-rata lama sekolah di suatu wilayah tidak akan memendek dalam kondisi tertentu. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Situbondo dari tahun 2018 hingga tahun 2021 menunjukkan tren yang baik, kecuali tahun 2022 yang mengalami penurunan. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Situbondo adalah 6,11 pada tahun 2018, 6,12 pada tahun 2019, dan 6,46 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah adalah 6,62, dan pada tahun 2022 turun menjadi 6,54. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Situbondo berposisi dibawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Timur periode 5 tahun terakhir (Setda Situbondo, 2023).

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa bantuan PKH yang fokusnya berupa bantuan pendidikan di Kabupaten Situbondo masih belum terlaksana dengan baik dan optimal. Sehingga perlu adanya kajian ulang terkait Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan yang sebelumnya sudah berjalan. Dinas Sosial Kabupaten Situbondo melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam hal perlindungan dan jaminan sosial ini, memberikan pendampingan dalam pelaksanaan PKH bidang pendidikan. Tujuannya agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tepat sasaran dan fokus bantuan pendidikan yang diberikan melalui PKH dapat berjalan lancar dan optimal.

Basis data yang digunakan untuk mengintervensi program bantuan sosial, khususnya PKH bidang pendidikan menggunakan data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Sosial memberikan pendampingan untuk program dari Kementerian Sosial berupa bantuan sosial PKH bidang pendidikan sebanyak 34.135 Rumah Tangga DTKS. jumlah keluarga penerima manfaat PKH bidang pendidikan se-Kabupaten Situbondo sejumlah 34.135 Rumah Tangga DTKS pada tahun 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya KPM di Kabupaten Situbondo untuk PKH Bidang Pendidikan sehingga perlu adanya penelitian terkait Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan tersebut.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pada penyusunan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan perbandingan dalam penelitian yang peneliti lakukan, yaitu terkait Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian Winda Mediana dan Hasim As'ari yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Mediana & Hasim As'ari, 2021), ditemukan bahwa penyelenggaraan PKH di Kabupaten Kampar Provinsi Riau belum memberikan manfaat menyeluruh, KPM menemui masalah ketika melaksanakan akses sarana kesehatan dan pendidikan, sosialisasi kebijakan PKH saat masa pandemi Covid-19 belum efektif, SOP untuk melaporkan persoalan KPM PKH yang bersinggungan dengan BPNT yang tidak tersistem, serta bermasalah data administrasi pada E-PKH. Penelitian Ganang Dibya Angkasa dan Indah Prabawati yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Desa Kedungrojo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban (Angkasa & Prabawati, 2017), ditemukan bahwa pelaksanaan PKH masih belum sesuai dengan standar dan tujuan yang sudah ditetapkan, yaitu masih ditemukannya permasalahan masyarakat yang belum menunjukkan adanya peningkatan ekonomi. Sasaran dari kebijakan masih belum tepat karena masih ditemui ada masyarakat yang masuk kriteria tapi tidak terdaftar dalam PKH. Penelitian Cahyo Sasmito dan Ertien Rining Nawangsari yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu (Sasmito & Nawangsari, 2019), ditemukan bahwa implementasi PKH dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Batu telah berjalan dengan baik dan lancar. Dinas Sosial Pemerintah Kota Batu telah menjalankan wewenangnya dengan baik dari segala aspek, baik komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Penelitian Yosua Mandolang, Florence Daicy Lengkon dan Salmin Dengo yang

berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan (Mandolang, Langkong, & Dengo, 2016), ditemukan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan belum berjalan optimal, ada kekurangan pada dimensi komunikasi. Kendalanya yakni Dinas Sosial belum maksimal dalam berkomunikasi secara intens dengan instansi terkait, yaitu BPS, hal ini menjadi penyebab banyak masyarakat yang tidak tepat sasaran. Penelitian Khodziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, dan Siswidiyanto yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto (Kholif, Noor, & Siswidiyanto, 2019), ditemukan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto belum berhasil. Tidak semua kebijakan PKH terlaksana dengan baik. Tujuan PKH juga belum maksimal. Penelitian Nurul Jannah yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan (Studi Kasus di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area) (Jannah, 2020), ditemukan bahwa implementasi kebijakan PKH di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area keberhasilannya dilihat dari beberapa faktor, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya manusia dan sumber daya uang, karakteristik agen pelaksana PKH sudah sesuai dengan buku pedoman, sikap para pelaksana PKH mendampingi penerima dengan baik, komunikasi organisasi pelaksana terjalin dengan baik, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik mendukung adanya PKH. Selain itu, perekonomian masyarakat terbantu terutama bidang pendidikan, dengan PKH penerima bantuan dapat menyekolahkan anak-anaknya walaupun masih ada kendala, yaitu minimnya anggaran dana menyebabkan banyak kegiatan belum terlaksana. Penelitian Alfian Fauzi Ardiyanto dan Indah Prabawati yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk (Studi Pada Bidang Pendidikan) (Ardiyanto & Prabawati, 2021), ditemukan bahwa fasilitas yang ada dalam implementasi PKH oleh PPKH dalam Bidang pendidikan belum tersedia dengan baik. Sedangkan indikator lainnya sudah terpenuhi dengan baik. Hambatan yang dihadapi dalam Proses verifikasi, kendala fasilitas, dan kendala proses informasi penyaluran dana. Penelitian Antriya Eka Suwinta dan Indah Prabawati yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar (Suwinta & Prabawati, 2016), ditemukan bahwa implementasi PKH di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar kurang berhasil. Hal ini dikarenakan walaupun serangkaian tahapan yang berjalan dengan lancar, sumberdaya yang dimiliki meliputi staf, kewenangan, informasi dan fasilitas maupun kemampuan pelaksana (disposisi) PKH di Desa Maron juga telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan PKH dan para pelaksana di Desa Maron juga telah menjalankan tugas sesuai dengan *Standard Operational Procedures* (SOP's) serta melakukan pembagian tata kerjanya dengan baik, namun demikian dalam implementasi PKH di Desa Maron masih ditemui kendala antara lain kurang sadarnya peserta PKH terhadap inti sari PKH dan arti pentingnya PKH bagi kehidupan peserta PKH, permasalahan *intern* antara pelaksana pusat dan daerah serta permasalahan fanatime bidan. Penelitian Yudid B.S. Tlonaen, Willy Tri

Hardianto, dan Carmia Diahloka yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Tlonaen, Hardianto, & Diahloka, 2014), ditemukan bahwa implementasi program keluarga harapan (PKH) di kecamatan Lowokwaru ditujukan kepada masyarakat miskin khususnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan bantuan tersebut bersifat khusus, berupa data masyarakat sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Adapun upaya yang dilakukan pendamping PKH di kecamatan Lowokwaru adalah sebagai berikut: melakukan pemutakhiran data peserta PKH secara berkala, melakukan pertemuan bulanan secara rutin dengan kelompok peserta PKH. Mengadakan pertemuan pengembangan program dengan penyedia layanan. Penelitian Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban) (Virgoreta, Pratiwi, & Suwondo, 2014), ditemukan bahwa penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu, yakni tentang implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan dengan menggunakan teori implementasi Prof. Muchlis Hamdi yang menyatakan bahwa implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh dimensi, yaitu produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Kemudian determinan yang terdiri dari, substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran, dan sumber daya (Hamdi, 2014).

#### **1.5 Tujuan**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi serta faktor-faktor penghambat implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Kemudian upaya untuk mengatasi faktor penghambat implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih karena meningkatkan presisi dalam mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Penelitian kualitatif adalah teknik untuk menyelidiki dan mempelajari tujuan seseorang atau sekelompok individu yang diduga mempunyai permasalahan sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2018). Penelitian kualitatif pada dasarnya memanfaatkan data yang berasal dari pendapat, perspektif, dan tanggapan orang yang diteliti secara lisan dan tertulis (Sujarweni, 2019). Sedangkan teknik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara luas dan menyeluruh mengenai bagaimana implementasi PKH bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur.

Menurut Hardani (2020:120-121), fokus utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Peneliti mengumpulkan berbagai jenis data, seperti wawancara, observasi, dan dokumen, serta material digital daripada mengandalkan satu sumber data. Dalam mengumpulkan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 15 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, koordinator PKH Kabupaten Situbondo masing-masing 1 orang, koordinator pendamping PKH setiap kecamatan di Kabupaten Situbondo sebanyak 3 orang, serta Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo sebanyak 9 orang. Adapun untuk analisis data menurut Miles dan Huberman (1994:10-12) menjadi 3 alur aktivitas, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo dengan lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini terkait dengan tercapainya tujuan kebijakan, tentu dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Keberhasilan sebuah kebijakan menurut Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D sangat dipengaruhi oleh 5 determinan dengan 14 indikatornya. Indikator-indikator tersebutlah yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam menentukan faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo.

#### **3.1 Faktor Penghambat**

Faktor penghambat merupakan suatu hal yang mempunyai sifat menghambat atau bahkan menahan sehingga menyebabkan suatu hal berjalan tidak lancar atau bahkan tertahan. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Situbondo ini sudah berjalan sesuai dengan aturan dan pedoman yang mengatur. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan. Adapun faktor penghambat implementasi dapat dianalisis melalui determinan sebagai berikut:

##### **3.1.1 Substansi Kebijakan**

Substansi kebijakan ini mencakup beberapa indikator implementasi kebijakan, antara lain konsistensi mengenai isi/spesifikasi dari sebuah kebijakan serta keselarasan substansi sebuah kebijakan tersebut terhadap substansi kebijakan lainnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa memang betul pendistribusian dan pencairan dana PKH bidang pendidikan langsung ke rekening para KPM bidang pendidikan. Rekening yang dimiliki oleh para KPM ini berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk memudahkan proses pencairan dana bantuan PKH bidang pendidikan dari pemerintah. Hanya saja terdapat beberapa KPM yang menyampaikan terkait keterlambatan pencairan dana bantuan PKH bidang pendidikan tersebut, walaupun keterlambatan yang terjadi tidak berkepanjangan dan bisa segera dilaporkan oleh pendamping PKH kepada Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Jadi sudah tugas pelaksana PKH untuk membantu permasalahan para KPM agar kebijakan ini

terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan berhasil mengurangi kemiskinan di Kabupaten Situbondo.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa substansi kebijakan tentang implementasi PKH bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo ditemukan faktor penghambat, yaitu terjadi beberapa keterlambatan pencairan dana bantuan PKH bidang pendidikan. Walaupun tidak terjadi kepada semua atau sebagian besar KPM, serta tidak terjadi berkepanjangan dan segera dilaporkan oleh pendamping PKH kepada Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Secara umum substansi kebijakan sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku serta sesuai dengan keinginan dan harapan Pemerintah Kabupaten Situbondo, khususnya di bidang pendidikan bagi anak-anak Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Situbondo.

### **3.1.2 Perilaku Tugas Pelaksana**

Pada determinan ini, perilaku tugas pelaksana mencakup beberapa indikator berupa motivasi kerja para pelaksana, tendensi terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana, dan juga kemampuan pembelajaran (belajar dari pengalaman) para pelaksana kebijakan tersebut.

Peneliti melakukan observasi pada saat turun kepada para KPM bersama dengan pendamping PKH tiap kecamatan. Beliau semua memang betul-betul ingin memberikan bantuan dan pelayanan terbaik kepada para KPM bidang pendidikan. Para pendamping juga merupakan orang tua yang memiliki anak sekolah, sehingga mereka ingin anak-anak KPM bidang pendidikan ini juga mendapatkan bantuan pendidikan untuk bisa lanjut sampai jenjang pendidikan tinggi. Tujuannya juga untuk meningkatkan sumber daya manusia sejak anak menjalani pendidikan dan bisa mengurangi kemiskinan di Kabupaten Situbondo.

Peneliti menyimpulkan bahwa perilaku tugas pelaksana terkait implementasi PKH bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo tidak ditemukan perilaku atau sikap para pelaksana yang bisa menghambat terlaksananya kebijakan PKH bidang pendidikan ini. Bahkan perilaku tugas pelaksana sudah sangat baik dan sesuai pedoman serta kode etik, baik pendamping PKH maupun para KPM sehingga implementasi PKH bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo berjalan sesuai yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dan harapannya semakin meningkatkan taraf pendidikan anak-anak di Kabupaten Situbondo demi mengurangi kemiskinan.

### **3.1.3 Interaksi Jejaring Kerja**

Interaksi jejaring kerja merupakan salah satu determinan implementasi kebijakan yang mencakup kerjasama antara pelaksana kebijakan serta hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan juga bersamaan dengan wawancara dan *sharing* dengan para KPM, mereka para orang tua KPM bidang pendidikan sering bertemu dan interaksi baik saat pertemuan P2K2 maupun sehari-hari karena mereka hidup bertetangga dalam satu wilayah berdekatan. Para KPM bidang pendidikan ini kebanyakan hidup dalam 1 (satu) desa yang sama dan berdekatan sehingga mudah untuk berinteraksi. Interaksi dan hubungan antara

Dinas Sosial dengan dinas terkait juga baik, karena memang perlu kerja sama dan bantuan dinas lainnya. Meskipun respon atau tanggapan tidak langsung diberikan, karena perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum memberikan saran, tanggapan, dan solusi. Bahkan interaksi dan hubungan antara para pelaksana (Dinas Sosial, koordinator PKH, dan pendamping PKH) dengan kelompok sasaran (Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan) terjalin sangat baik. Selain itu juga para koordinator dan pendamping PKH juga sering kumpul koordinasi dan membahas PKH ini, baik di waktu kerja maupun setelah kerja.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa interaksi jejaring kerja dalam implementasi PKH bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo ditemukan faktor penghambat, yaitu meskipun hubungan antara Dinas Sosial dengan instansi terkait PKH ini juga baik dan terjalin dengan lancar, tetapi ketika ada permasalahan yang berkaitan dinas lainnya masih kurang cepat respon, saran, dan/atau tanggapan yang diberikan dinas tersebut. Sedangkan interaksi jejaring kerja secara keseluruhan sudah baik dan teratur, baik antara para KPM dengan KPM, antara KPM dengan pendamping PKH, antara KPM dengan koordinator PKH maupun dengan Dinas Sosial.

#### **3.1.4 Partisipasi Kelompok Sasaran**

Determinan partisipasi kelompok sasaran menyangkut beberapa hal mengenai tingkat penerimaan terhadap manfaat atau *benefit* kegiatan yang dilakukan serta kemampuan ikut andil atau berkontribusi sesuai prosedur yang ditentukan.

Peneliti melakukan observasi di lapangan secara langsung. Peneliti datang pada saat kegiatan P2K2 yang dilakukan oleh pendamping PKH bersama orang tua KPM bidang pendidikan. Orang tua KPM sangat antusias dengan kegiatan P2K2 ini karena para pendamping PKH juga ditemani oleh koordinator PKH memberikan materi dan pembelajaran kepada mereka mengenai pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial agar mendorong perubahan perilaku KPM ke arah yang lebih baik lagi. Tujuannya juga pendidikan anak-anak KPM bisa semakin meningkat dan semangat dalam menjalani pendidikannya. Selain itu, berdasarkan yang disampaikan oleh orang tua KPM terkait harapan untuk PKH agar bisa lanjut sampai jenjang pendidikan sekolah tinggi bagi anak-anak mereka kedepannya.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa partisipasi kelompok sasaran dalam implementasi PKH bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo tidak ada faktor penghambat, bahkan partisipasi kelompok sasaran sangat baik terlaksana dan teratur. Selain itu juga banyak dari para KPM bidang pendidikan yang berharap agar program PKH bidang pendidikan ini terus berlanjut, tidak hanya sampai pendidikan jenjang SMA/SMK sederajat tetapi bisa lanjut sampai perguruan tinggi. Hal ini terlihat dari tabel data didik PKH Kabupaten Situbondo dibawah ini.

**Tabel Data Anak Didik PKH Kabupaten Situbondo Tahun 2017 s/d 2021**

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	SD / sederajat	11.108	18.320	17.411	16.151	16.478
2.	SMP / sederajat	6.903	9.517	9.548	9.446	9.904
3.	SMA / sederajat	4.439	6.051	7.176	7.151	7.673

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah data anak didik Program Keluarga Harapan mengalami naik dan turun. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan jumlah anak didik PKH. Kemudian tahun 2019 mengalami penurunan jumlah serta tahun 2020 kembali mengalami penurunan akibat pandemi covid-19 saat itu. Tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan jumlah data anak didik PKH yang menunjukkan bahwa partisipasi KPM dalam implementasi PKH bidang pendidikan ini semakin meningkat. Karena semakin bertambahnya jumlah anak didik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang paling tinggi. Bahkan banyak dari KPM yang peneliti wawancarai menginginkan PKH bidang pendidikan terus berlanjut sampai anak KPM bidang pendidikan bisa lanjut ke perguruan tinggi. Tujuannya untuk meningkatkan taraf pendidikan anak-anak di Kabupaten Situbondo, sehingga SDM meningkat dan mengurangi kemiskinan sedikit demi sedikit dengan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan ini.

### 3.1.5 Sumber Daya

Determinan implementasi kebijakan yang terakhir adalah sumber daya yang menyangkut kecukupan dana (anggaran), ketersediaan pelaksana, kecukupan peralatan, ketersediaan informasi yang diperlukan, serta ketepatan teknologi yang digunakan.

Peneliti ketika bertemu dan *sharing* dengan para KPM melihat dan mendengarkan langsung harapan dan pertanyaan dari orang tua KPM. Beberapa orang tua KPM benar-benar berharap anaknya bisa lanjut pendidikan. Beberapa KPM juga mendatangkan anaknya langsung saat kegiatan P2K2 tersebut untuk bisa mendengarkan langsung arahan dan bimbingan dari koordinator dan pendamping PKH. Sehingga orang tua dan anak-anak KPM bidang pendidikan bisa bersama-sama mengatur dan mengelolah dana bantuan PKH bidang pendidikan tersebut untuk kebutuhan pendidikan dan selebihnya bisa disimpan serta dipakai saat ada keperluan lainnya.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sumber daya dalam implementasi PKH bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo sudah optimal dan tepat sasaran. Namun masih ada beberapa faktor penghambat implementasi PKH bidang pendidikan ini, yaitu terkait ketersediaan informasi yang diperlukan. Dimana data jumlah KPM bidang pendidikan serta data anak didik PKH di Kabupaten Situbondo hanya data sampai tahun 2021. Hal ini dikarenakan pergantian aplikasi dari e-PKH menjadi SIKS-NG yang membuat pemutakhiran data yang bisa diakses oleh koordinator dan pendamping PKH cukup terbatas. Sedangkan terkait sumber daya anggaran diberikan langsung kepada para KPM bidang pendidikan melalui rekening masing-masing. Selain itu juga para KPM bidang pendidikan sudah mulai

mengerti dan paham terkait prioritas penggunaan bantuan PKH bidang pendidikan itu untuk apa saja. Jadi seluruh kebutuhan dan keperluan pendidikan anak terpenuhi dengan tujuan meningkatkan taraf pendidikan anak-anak di Kabupaten Situbondo, sehingga SDM meningkat dengan program ini.

### **3.2 Upaya**

Upaya dapat dikatakan sebagai usaha untuk memecahkan persoalan atau solusi untuk suatu permasalahan. Setelah mengetahui apa saja faktor penghambat dalam implementasi PKH bidang pendidikan, selanjutnya peneliti ingin memahami tentang bagaimana saja upaya yang harus segera dilakukan oleh seluruh pelaksana PKH, mulai dari Dinas Sosial, koordinator PKH kabupaten, pendamping PKH tiap kecamatan, serta para KPM itu sendiri. Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Situbondo senantiasa berupaya agar hambatan-hambatan dalam implementasi PKH bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo yang sudah disebutkan sebelumnya bisa teratasi dengan segera dan sebaik mungkin oleh semua pihak terkait. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, antara lain:

#### **1. Peningkatan transparansi dalam penentuan KPM PKH Bidang Pendidikan**

Proses pendataan merupakan proses awal dan kunci dalam menentukan sasaran penerima PKH bidang pendidikan tersebut layak atau tidak. Untuk menjadi penerima bantuan PKH tentu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai pedoman PKH, yaitu keluarga yang dikategorikan sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), memiliki penghasilan yang rendah sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan terutama dalam aspek pendidikan.

Salah sasaran calon penerima bantuan (KPM) bidang pendidikan sering terjadi pada tahap pendataan awal. Banyak KPM PKH bidang pendidikan yang sebenarnya berasal dari keluarga mampu tetapi mendapat dana bantuan. Karena secara legal formal data KPM ini berasal dari DTKS, yang dimana DTKS ini untuk sekarang hanya bisa diakses melalui aplikasi SIKS-NG. Sedangkan yang bisa mengakses aplikasi ini adalah operator SIKS-NG desa atau kelurahan.

Berdasarkan penjelasan diatas berarti perlu ditingkatkan kembali tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terkait PKH bidang pendidikan. Dinas Sosial, koordinator PKH kabupaten, serta pendamping PKH yang bertugas dapat lebih teliti dan lebih memfilter data calon KPM yang masuk. Karena nama calon KPM merupakan rekomendasi dari Ketua RT/RW masing-masing, sehingga dikhawatirkan terjadi nepotisme dalam penentuan calon KPM ini. Bahkan jika perlu Dinas Sosial, koordinator PKH kabupaten, serta pendamping PKH dapat melakukan survei dan pengecekan ke tempat tinggal calon KPM sesuai alamat yang terdapat pada data yang diserahkan. Jika hal ini dilakukan, maka salah sasaran penerima bantuan PKH bidang pendidikan tidak akan terjadi lagi. Dana bantuan PKH diterima oleh KPM yang benar-benar kurang mampu dan membutuhkan sehingga tujuan pemerintah meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan.

## **2. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana bagi pendamping PKH**

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai bagi para pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi PKH bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo. Solusi untuk masalah ini adalah bagaimana pemerintah melalui Dinas Sosial memperhatikan dan memberikan fasilitas kepada para pendamping PKH, antara lain sekretariat PKH dan mempercepat pemberian fasilitas pendukung seperti laptop, kendaraan operasional, dan akomodasi setiap jadwal monitoring dan pertemuan P2K2 kepada para KPM bidang pendidikan.

Melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa memang perlu adanya peningkatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana guna memperlancar tugas pendamping PKH. Jika hal ini dilakukan tentunya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pendamping PKH semakin lancar di Kabupaten Situbondo.

## **3. Pemberitahuan jika bantuan PKH bidang pendidikan tidak tepat waktu**

Berdasarkan hasil diskusi dan berbincang dengan KPM bidang pendidikan bahwa sering terjadi keterlambatan dana bantuan PKH bidang pendidikan sampai ke KPM. Keterlambatannya pencairan dana bantuan PKH bidang pendidikan berasal dari pemerintah pusat. Keterlambatan pencairan bantuan PKH bidang pendidikan sampai ke tangan KPM berasal dari pusat. Diharapkan kedepan, hal yang seperti ini tidak terulang sehingga penerima manfaat benar-benar dapat menerima haknya sesuai jadwal yang ditentukan. Dan jikalau ada keterlambatan, sebisanya Dinas Sosial, koordinator PKH, dan pendamping PKH akan memberitahu serta menyampaikan kepada KPM, khususnya bidang pendidikan karena tujuannya untuk meningkatkan taraf pendidikan yang seterusnya bisa meningkatkan SDM.

## **4. Peningkatan akses aplikasi SIKS-NG terkait layanan informasi PKH bidang pendidikan**

Berdasarkan penjelasan dari koordinator PKH kabupaten terkait akses aplikasi SIKS-NG, terdapat keterbatasan dalam akses aplikasi tersebut. Dimana untuk meng-*export* data pemutakhiran DTKS bagi KPM PKH bidang pendidikan tidak bisa dilakukan seperti sebelumnya saat masih menggunakan aplikasi e-PKH. Kementerian Sosial sebagai pembuat kebijakan PKH serta operator utama aplikasi SIKS-NG harus melakukan peningkatan dalam akses aplikasi tersebut. Hal ini supaya para pelaksana kebijakan PKH di daerah bisa mengakses secara penuh aplikasi tersebut. Karena para pelaksana kebijakan PKH di daerah yang turun langsung dan berinteraksi dengan para KPM bidang pendidikan. Sehingga koordinator dan pendamping PKH bisa juga mengakses dan meng-*export* data kesejahteraan sosial serta bisa menentukan kelayakan dari calon penerima manfaat PKH bidang pendidikan.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Peneliti mendapatkan temuan penting, yakni jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan mengalami peningkatan sejak tahun 2017 s/d 2021. KPM PKH bidang pendidikan terus mengalami kenaikan berbanding lurus dengan

peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo. Hal ini juga sebagai upaya mengurangi kemiskinan melalui peningkatan taraf pendidikan para KPM, sehingga sumber daya manusia juga mengalami peningkatan menjadi lebih baik. Untuk itu secara produktivitas, implementasi PKH bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo semakin produktif bagi pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan PKH bidang pendidikan tersebut.

Pada efisiensi dana atau sumber daya finansial, sudah ada dana sharing yang merupakan perpaduan antara APBN dengan APBD. Sedangkan efisiensi dari segi teknologi, masih terkendala aplikasi SIKS-NG yang mana koordinator PKH kabupaten saat ini tidak bisa mengakses dan meng-*export* hasil *input* data dari pendamping PKH. Padahal aplikasi SIKS-NG ini merupakan pembaharuan dari aplikasi e-PKH sebelumnya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis dari determinan terkait faktor penghambat implementasi PKH bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa:
  - a. Substansi kebijakan ditemukan faktor penghambat, yaitu terjadi beberapa keterlambatan pencairan dana bantuan PKH bidang pendidikan.
  - b. Perilaku tugas pelaksana tidak ditemukan perilaku atau sikap para pelaksana yang bisa menghambat terlaksananya PKH bidang pendidikan ini. Bahkan perilaku tugas pelaksana sudah sangat baik dan sesuai pedoman serta kode etik, baik pelaksana kebijakan maupun para kelompok sasaran.
  - c. Interaksi jejaring kerja ditemukan faktor penghambat, yaitu ketika ada permasalahan yang berkaitan dinas lainnya masih kurang cepat respon, saran, dan/atau tanggapan yang diberikan dinas tersebut.
  - d. Partisipasi kelompok sasaran tidak ditemukan faktor penghambat, bahkan partisipasi kelompok sasaran sangat baik terlaksana dan teratur.
  - e. Sumber daya ditemukan faktor penghambat, yaitu terkait ketersediaan informasi yang diperlukan.
2. Upaya untuk mengatasi hambatan implementasi PKH bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo, antara lain:
  - a. Peningkatan transparansi dalam penentuan KPM.
  - b. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana bagi pendamping PKH.
  - c. Pemberitahuan jika bantuan PKH bidang pendidikan tidak tepat waktu.
  - d. Peningkatan akses aplikasi SIKS-NG terkait layanan informasi PKH bidang pendidikan.

#### Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki keterbatasan utama, yaitu keterbatasan waktu dan biaya penelitian. Hal ini dikarenakan peneliti mengambil studi kasus se-Kabupaten Situbondo, seharusnya diperlukan waktu yang lumayan panjang dari target waktu penelitian serta biaya yang dibutuhkan juga bertambah.

#### Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan ini masih tergolong masih awal dan kurang matang. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dapat

dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi studi kasus yang serupa berkaitan dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo dengan harapan ditemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, Ganang Dibya, & Prabawati, Indah. (2017). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Desa Kedungrojo Kecamatan Plumpung Kabupaten Tuban*.
- Ardiyanto, Alfian Fauzi, & Prabawati, Indah. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk (Studi Pada Bidang Pendidikan)*.
- BPS Jawa Timur. (2020). Daftar 15 Besar Kemiskinan Jawa Timur. Retrieved October 16, 2023, from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur website: <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/421/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>
- BPS Kabupaten Situbondo. (2023a). *Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2023*. Situbondo: BPS Kabupaten Situbondo.
- BPS Kabupaten Situbondo. (2023b). Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo. Retrieved October 16, 2023, from Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo website: <https://situbondokab.bps.go.id/indicator/23/48/1/persentase-penduduk-miskin-kabupaten-situbondo.html>
- Creswell, J. W. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. California: Sage Publications, Inc.
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Jannah, Nurul. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan (Studi Kasus di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area*.
- Kholif, Khodziah Isnaini, Noor, Irwan, & Siswidiyanto. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan ( PKH ) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/79446/implementasi-program-keluarga-harapan-pkh-dalam-menanggulangi-kemiskinan-di-keca>
- Mandolang, Yosua, Langkong, Florence, & Dengo, Salmin. (2016). *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan*. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/25346/25033>
- Mediana, Winda, & Hasim As'ari. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2265988>
- Miles, & Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press.

- Permensos RI No. 1 Tahun 2018. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*. , (2018).
- Sasmito, Cahyo, & Nawangsari, Ertien Rining. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>
- Setda Situbondo. (2023). *Rencana Akhir RKPD 2023*. Situbondo: Pemkab Situbondo.
- Sujarweni, W. (2019). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suwinta, Antriya Eka, & Prabawati, Indah. (2016). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar*.
- Tlonaen, Yudid B. S., Hardianto, Willy Tri, & Diahloka, Carmia. (2014). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*.
- Virgoreta, Dyah Ayu, Pratiwi, Ratih Nur, & Suwondo. (2014). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)*.

